

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SUBUN BESTOBE, KECAMATAN INSANA BARAT, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hilarius Tahoni¹, Yakobus Kolne², Ignasius Usboko³

Email: [1hilariustahoni633@gmail.com](mailto:hilariustahoni633@gmail.com), [2graciakolne@gmail.com](mailto:graciakolne@gmail.com) [3usbokoignasius@gmail.com](mailto:usbokoignasius@gmail.com)

¹Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL – Universitas Timor

^{2,3}Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL – Universitas Timor

ABSTRAK

Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif inimenunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Subun Bestobe dapat dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan yang tergolong baik. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa yang kooperatif dan komunikatif dalam mengawal pengelolaan dana desa di wilayah Desa Subun Bestobe sehingga pertanggungjawaban pengelolaan dana tersebut dapat dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Partisipasi masyarakat meningkat karena kesadaran untuk membangun desa telah tertanam dalam diri masyarakat, yang kemudian mendorong masyarakat untuk ikut berkontribusi secara aktif dalam pengelolaan desa. Sikap pemerintah desa yang transparan dan akuntabel dalam memanfaatkan dana desajuga meminimalisir terjadinya penyelewengan dana desa. Walau demikian masih terdapat keterbatasan besaran dana desa yang masih minimalis sehingga tidak cukup optimal dimanfaatkan bagi kemajuan masyarakat desa, khususnya dalam pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Desa Subun Bestobe, Partisipasi masyarakat, pembangunan desa.*

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik didaerah kota. Hal tersebut menunjukkan bahwa begitu besar pengaruh dari partisipasi masyarakat, sebab partisipasi masyarakat ini sangat menentukan pembangunan yang ada di sekitar masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, keberhasilan suatu program tidak akan berjalan dengan baik. Keikutsertaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program pembangunan tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan memerlukan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penting diterapkan berbagai strategi untuk membentuk kesadaran masyarakat. Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai objek saja, tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan tersebut. Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.

Merencanakan suatu program bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Program yang baik harus sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang menjadi sasaran dari program tersebut. Semakin beragam dan kompleks kebutuhan dan permasalahan dari kelompok sasaran, akan semakin rumit penyusunan perencanaan suatu program.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia. Secara konkrit, hal itu dapat diarahkan pada penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan, guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Pembangunan desa yang mengedepankan partisipasi masyarakat juga terjadi di Desa Subun Sestobe, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat sangatlah penting demi terwujudnya hasil-hasil pembangunan di Desa Subun Bestobe. Sebagai wujud adanya partisipasi masyarakat di Desa Subun Bestobe saat ini, telah dibangun berbagai infrastruktur seperti gedung posyandu, gedung SD, gedung PAUD, balai Desa, kantor Desa, selokan air dan jalan usaha tani.

Selain pembangunan infrastruktur tersebut, di Desa Subun Bestobe juga dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat seperti bakti sosial (BAKSOS). Bakti sosial ini dilaksanakan setiap hari Jumat. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, seperti membersihkan kantor Desa, balai Desa, dan jalan raya.

Dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana disebutkan di atas tentunya dibutuhkan partisipasi seluruh masyarakat. Penelitian ini lebih difokuskan pada pembangunan jalan usaha tani. Jalan usaha tani itu dilaksanakan di Dusun Ilmenuju Kampung Adat Nikmeto yang terletak di Dusun I Desa Subun Bestobe, Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan jalan usaha tani yang dimaksud berupa pembukaan jalan baru, dengan panjang jalan 1.790 m. Anggaran yang dialokasikan pemerintah desa sebesar Rp.108.816.500 (Seratus delapan juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), yang peruntukannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Pembangunanan Jalan Usaha Tani

No	Jenis kegiatan	Volume	Anggaran	Ket.
1	Pembukaan jalan baru usaha tani	1.790 m	108.816.500	Selesai
2	HOK/Harian Orang kerja	10 orang x 29 hari x 57.000	16.385.800	Selesai
3	HOK TPBJ	3 orang	14.050.000	Selesai

Sumber dana : *Dana Desa Subun Bestobe tahun anggaran 2019.*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pembangunan pembukaan jalan baru tersebut tingkat partisipasi masyarakatnya masih relatif rendah karena ada sebagian masyarakatnya tidak terlibat dalam pengerjaan pembukaan jalan baru sepanjang 1.790 meter, jika dibandingkan dengan total jumlah masyarakat sebagaimana dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Komposisi Jumlah Kepala Keluarga (KK)

Wilayah Desa Subun Bestobe	Jumlah KK	Luas wilayah
Dusun (1)	58	4 Km
Dusun (2)	78	3 Km
Jumlah	136	7 Km

Sumber Data : *RPJMDESA Tahun 2019*

Intensitas dan bentuk partisipasi masyarakat diatas dapat pula berbeda diantara bidang-bidang partisipasi dalam pembangunan, seperti bidang perencanaan, bidang pelaksanaan, evaluasi atau monitoring, dan pemanfaatan hasil atau pengawasan. Secara teori perbedaan tersebut dapat pula disebabkan oleh adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dimaksud adalah kesadaran atau keamanan, pendidikan, dan penghasilan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kepemimpinan dan fasilitas yang tersedia.

Dalam realitasnya, tidak semua anggota masyarakat di Desa Subun Bestobe ikut berpartisipasi, dengan berbagai macam alasan. Hal ini disadari karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipasi dalam pembangunan, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti ini akan merubah sikap serta tindakan masyarakat yang selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi. Hal ini menunjukkan betapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi tercapainya pelaksanaan program pembangunan maksimal.

Sesuai dengan deskripsi di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang menarik, bahwa tidak semua anggota masyarakat di Desa Subun Bestobe ikut berpartisipasi dalam pembangunan jalan usaha tani. Partisipasi masyarakat Desa Subun Bestobe masih rendah atau relatif bervariasi baik dari segi intensitasnya maupun dari segi bentuknya. Jumlah penduduk di dalam buku register desa Subun Bestobe sebanyak 136 KK dan jumlah jiwa 548 yang terdiri dari laki-laki 280 perempuan 268. Dari jumlah itu, warga masyarakat di desa Subun Bestobe yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembukaan jalan usaha tani dari lokasi Dusun II menuju kampung adat Nikmeto RT/RW 001/001 Dusun I desa Subun Bestobe hanya sedikit (10 Orang).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Pendekatan ini membantu peneliti untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Subun Bestobe, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini akan difokuskan pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan usaha tani di Desa Subun Bestobe

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Subun Bestobe.

Masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan harus ikut serta aktif dalam pembangunan dan menikmati pembangunan serta melestarikan pembangunan itu secara berkesinambungan. Pembangunan desa dapat dikatakan berhasil apabila desa tersebut memiliki sarana dan prasarana yang lengkap atau paling tidak pembangunan yang dilakukan dapat mendukung kemajuan masyarakat baik kemajuan dibidang ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan khususnya pembangunan desa tersebut tidak akan dapat tercapai apabila masyarakat dan pemerintah tidak saling bekerjasama. Kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat tergantung pada Kepala Desa dan Aparat Desa, sebagai aktor penggerak utama dalam terlaksananya pembangunan desa. Pemerintah Desa berperan dalam menumbuhkan kesadaran warga desa untuk peran serta dalam pembangunan.

Di Desa Subun Bestobe pembangunan yang dilakukan relatif sangat rendah, bahkan bisa dikatakan minim. Suatu pembangunan dikatakan berhasil apabila pembangunan yang dilakukan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Salah satu contoh pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat di Desa Subun Bestobe adalah pembangunan rumah layak huni, yang sudah banyak ditempati oleh masyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan merupakan hubungan antara perencanaan dan pelaksanaannya cukup erat. Masalah pelaksanaannya sudah cukup dipertimbangkan dalam menyusun rencana, sehingga terdapat jaminan yang lebih besar dalam merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran dan rencana itu. Oleh sebab itu, rencana harus diupayakan semaksimal mungkin.

Pembangunan meliputi pengaruh daya dan dana administrasi, koordinasi dan penjabarannya dalam program pembangunan. Setelah tahap perencanaan selesai dan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari proses pelaksanaan program pemanfaatan dana desa di Desa Subun Bestobe. Selain itu proses partisipasi dapat dilihat dari keaktifan masyarakat dalam ikutserta melaksanakan pekerjaan dalam kegiatan pembangunan yang berupa pembuatan croswe, deker, serta infrastruktur yang berupa jalan dan bangunan, dengan memberikan kontribusi harta

yang berupa makanan dan minuman yaitu seperti gorengan, air kopi dan air putih. Kemudian kontribusi tenaga dan keahlian yaitu masyarakat ikut berpartisipasi didalam pekerjaan pembuatan croswe dan deker dengan menggali tanah dengan bergotong royong bersama masyarakat yang lainnya.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga secara gotong royong dan sumbangan uang atau material serta keahliannya, merupakan bentuk dukungan sosial masyarakat dalam menerima hasil pembangunan secara bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Subun Bestobe partisipasi masyarakat aktif meskipun tahap pelaksanaan pembuatan croswe, deker dan pembangunan desa masih menggunakan tukang/ahlinya, yaitu masyarakat diberikan imbalan insentif keuangan dalam melakukan pembuatan croswe, deker dan pembangunan desa sudah memiliki kesukarelaan dengan memberikan kontribusi yang berupa pikiran, tenaga, dan keahlian untuk menunjang setiap program pembangunan di Desa Subun Bestobe.

Keterlibatan masyarakat dalam bentuk sumbangan yang berupa: tenaga, harta, dan keahliannya yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan akan memiliki dampak positif terhadap partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan hasil dari pembangunan itu sendiri sebab dengan ikut terlibatnya masyarakat dalam memberikan kontribusinya maka akan meningkatkan rasa memiliki dan bertanggung jawab moral terhadap keberhasilan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan dan Pemanfaatan

Partisipasi pemeliharaan dan pemanfaatan meliputi menerima hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri, menggunakan atau memanfaatkan setiap hasil pembangunan, menjadikan atau mengusahakan suatu lapangan usaha, merawat secara rutin dan sistematis, mengatur kegunaan atau memanfaatkannya dengan menjaga dan mengamankannya dan mengembangkan. Partisipasi pemeliharaan dan pemanfaatan berarti mendukung kearah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia, keadilan sosial, dan memelihara pembangunan sebagai lingkungan manusia untuk generasi yang akan datang.

Pemanfaatan hasil pembangunan merupakan wujud penerimaan masyarakat terhadap hasil pembangunan, dengan asumsi bahwa apabila masyarakat bersedia untuk memanfaatkan suatu hasil pembangunan berarti masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung juga menerima hasil pembangunan tersebut. Manfaat

dari hasil pembangunan yang berupa pembuatan talut, gorong-gorong dan pembangunan desa tersebut adalah masyarakat dapat menjaga lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari pencemaran. Hal ini lebih jauh dari sekedar menerima dan memanfaatkan adalah dengan memelihara hasil pembangunan tersebut sebagai wujud dari kepedulian masyarakat terhadap hasil pembangunan desa. Sedangkan partisipasi dalam pemeliharaan dan pemanfaatan diberikan langsung kepada masing-masing masyarakat yang merasakan manfaat dari hasil terlaksananya pembangunan desa tersebut. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sangat penting karena masyarakat adalah tujuan utama dari setiap pembangunan maka masyarakat juga harus memelihara dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin.

Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dalam hal ini tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan sudah nampak adanya walaupun pada tahap ini partisipasi dalam proses pemeliharaan, masyarakat hanya diharuskan dan tidak ada peraturan tertulis dan terikat dari Desa Subun Bestobe sendiri yaitu dengan menjaga dan merawatnya dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dan para informan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Subun Bestobe Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Persiapan

Dalam pelaksanaannya pemerintah desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat. Proses pembangunan desa akan berjalan dengan baik ketika kewenangan pemerintah desa dalam mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif berjalan sebagaimana yang diharapkan, untuk itu setelah kewenangan pemerintah dijalankan terhadap pembangunan desa, masyarakat juga harus mengambil bagian atau ikutserta dalam proses pembanguana desa, karena keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan sangat menentukan keberhasilan pembangunan desa.

“Masyarakat desa Subun Bestobe sangat menyadari betapa penting partisipasinya sebagai agen perubahan untuk dapat membantu pemerintah desa terlebih khusus

dalam pembangunan desa, karena di satu sisi mereka adalah pejuang bagi desa guna menunjang perkembangan dan pembangunan desa. Masyarakat sangat antusias dalam merespon setiap pembangunan di desa yang telah kami sediakan atau siap untuk dilaksanakan dari hasil yang sudah terprogram dalam musyawarah rencana pembangunan desa dan rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan kepada kami selaku pemerintah desa agar dapat melaksanakan pembangunan desa, mereka juga rela memberikan sumbangan baik dalam bentuk pikiran, fisik, finansial maupun fasilitas yang dimilikinya semata-mata demi keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat desa Subun Bestobe terutama dalam pembangunan-pembangunan yang ada di desa. Namun di sisi lain ada beberapa masyarakat yang masih kurang menyadari betapa pentingnya partisipasi mereka sebagai garda terdepan untuk menunjang terlaksananya setiap pembangunan desa sehingga masih bersikap apatis dan masa bodoh terhadap setiap kebijakan dalam pembangunan yang ada di desa.”

Secara garis besar kewenangan dari pemerintah desa telah berjalan dengan baik, pemerintah desa melalui program yang sudah ditetapkan dalam musyawarah rencana pembangunan desa maupun rencana pembangunan jangka menengah desa telah semaksimal mungkin menjalankan amanah yang telah dipercayakan dalam melaksanakan pembangunan desa.

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah desa saja tetapi juga merupakan tanggung jawab dari masyarakat, sebab pemerintahan tanpa adanya keterlibatan masyarakat bukanlah sebuah pemerintahan. Peran dan partisipasi masyarakat di desa Subun Bestobe sejauh ini sangat loyal terhadap setiap kegiatan pembangunan yang ada di desa. karena selain pemerintah desa setiap aktifitas yang dilaksanan turut melibatkan setiap lapisan masyarakat.

“Masyarakat sadar bahwa dalam pembangunan desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi merupakan tanggung jawab bersama, masyarakat punya peran yang cukup besar dalam kegiatan pembangunan guna kebutuhan dan kepentingan yang sama demi kesejahteraan masyarakat desa dan kemajuan dalam pembangunan desa. Namun tidak bisa di pungkiri ada sebagian masyarakat yang tidak peka dan keinginan untuk tidak mau melibatkan dirinya secara proaktif dalam setiap

pembangunan desa baik tenaga maupun fasilitas.”

Secara garis besar, pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah desa maupun masyarakat, pemerintah tidak dapat bekerja tanpa bantuan dan keterlibatan masyarakat, begitu juga masyarakat membutuhkan pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

Setiap kegiatan pembangunan desa, diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu manfaat dari pembangunan desa merupakan penentu atau akhir dari proses keikutsertaan masyarakat guna mencapai keberhasilan pembangunan desa.

“Partisipasi masyarakat desa Subun Bestobe terhadap pembangunan desa terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang berpartisipasi atas keinginannya sendiri dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang berpartisipasi tapi mengharapkan upah kerja. Jadi dapat digambarkan bahwa kelompok yang pertama adalah kelompok yang memiliki nilai-nilai gotong royong, bahu-membahu dan rela berkorban untuk pembangunan demi tercapainya tatanan masyarakat. Sadar akan diri dan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial yang hidup untuk saling membantu dan mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Sedangkan kelompok kedua adalah segelintir orang-orang yang hanya mementingkan rasa ego yang tinggi akibat kurang di dasari dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat yang telah lama ada dan tertanam dalam diri setiap masyarakat desa, masyarakat kelompok kedua harus lebih memahami dan menyadari bahwa apa yang mereka pikirkan dan lakukan tidak sesuai dengan cara hidup bermasyarakat, sebagai masyarakat yang tinggal atau berdomisili di desa Subun Bestobe harus menyadari bahwa yang berkaitan dengan kepentingan bersama harus di dukung, karena setiap kebijakan dalam pembangunan di desa adalah untuk kepentingan semua masyarakat di desa dan yang akan menerima manfaat dari pembangunan yang ada di desa adalah semua masyarakat mulai dari anak kecil sampai orang dewasa.”

Secara garis besar, bahwa manfaat dari pembangunan adalah untuk semua masyarakat tanpa memandang status, jabatan, golongan, umur dan lain sebagainya, karena pada hakekatnya manfaat dari pembangunan desa adalah untuk kepentingan bersama. Proses pembangunan tidak berjalan secara parsial, tapi merupakan satu kesatuan terpadu

antara partisipasi masyarakat dan pembangunan karena kedua komponen ini merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan sisi yang satu dengan yang lainnya.

Dalam kegiatan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat, masyarakat sebagai kunci penentuan keberhasilan desa. Artinya, melalui partisipasi yang di berikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa semata tetapi menuntut keterlibatan masyarakat secara total agar dapat tercapai dan menyentuh falsafah bangsa Indonesia yaitu sila kelima pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara empiris sesuai dengan apa yang penulis temukan di lokasi penelitian, dimana sebagian besar masyarakatnya berpartisipasi secara sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab tanpa ada paksaan atau dorongan dari pihak lain. Keikutsertaan masyarakat yang datang secara sukarela untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pembangunan mensyaratkan adanya kepercayaan, peluang dan kesempatan yang di berikan oleh pemerintah desa kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan sangat besar. Artinya, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat memberikan indikasi adanya pengakuan aparat desa dalam hal ini pemerintah desa bahwa masyarakat bukan sekedar obyek atau penikmat hasil pembangunan semata, melainkan subyek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat di andalkan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan tokoh masyarakat, Kepala Adat dan masyarakat diatas mengenai keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan dapat disimpulkan bahwa walaupun masyarakat dalam tahap pembangunan yang di mulai dari perencanaan dan tahap pelaksanaannya kurang terlibat namun masyarakat tetap memanfaatkan fasilitas pembangunan yang telah dilakukan baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak pemerintah desa.

Menurut masyarakat desa Subun Bestobe mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pembangunan diwujudkan keterlibatan seseorang pada tahap

pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tingkatan ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun. Jadi tujuan dari pembangunan yang telah dilaksanakan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dibuat oleh usaha manusia bersama yang melaksanakannya. Sehingga masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan bisa memanfaatkannya sebaik mungkin untuk dipergunakan secara bersama-sama.

Dalam kenyataannya masyarakat desa Subun Bestobe telah menikmati hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa tersebut walaupun masih belum maksimal dalam penggunaannya. Walaupun masyarakat dari awal perencanaan sampai pemanfaatan hasil ikut berpartisipasi tetap saja dalam pelaksanaannya masyarakat masih belum terlibat secara maksimal. Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan. Warga masyarakat semua mengikuti tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dalam proses kegiatan pembangunan desa di desa Subun Bestobe.

2. Pelaksanaan

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa tidak memberikan perhatian penuh dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu akan adanya kegiatan yang dilakukan di desa Subun Bestobe. Warga masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Subun Bestobe belum maksimal, karena kurangnya terjalin komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa serta tidak melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam suatu program/proyek, yang ikut mempengaruhi dan mengendalikan inisiatif pembangunan dan pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya pembangunan yang mempengaruhinya dan berguna bagi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Namun pada kenyataannya didalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa lebih memperkerjakan tukang, kemudian dalam kegiatan gotong royong masyarakat sendiri masih sedikit ikut

berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Alasan dari masyarakat yang kurang terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan terutama gotong-royong yang diadakan pemerintah desa adalah karena berbagai macam kesibukan baik kerja maupun pergi ke ladang karena mayoritas pekerjaan masyarakat di Desa Subun Bestobe adalah sebagai petani yang kesehariannya rata-rata berangkat ke ladang bahkan membangun rumah di ladang mereka sehingga untuk turun ke desa mereka jarang sekali ada di tempat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan apabila masyarakat ikut serta dalam memberikan kontribusi yang menunjang pelaksanaan pembangunan dengan wujud tenaga, uang maupun harta benda maupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan. Namun didalam hal ini belum semua masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di Desa Subun Bestobe, karena kurangnya informasi yang di dapatkan masyarakat sehingga masyarakat sendiri bersikap acuh tak acuh terhadap pembangunan yang berada di desa. Hal tersebut terjadi karena sikap tertutup yang dimiliki oleh pemerintah desa sehingga menyebabkan hanya sebagian kecil saja yang ikut terlibat dalam pembangunan yang ada.

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada pelatihan-pelatihan yang Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa guna menunjang keterampilan bagi masyarakat sehingga setiap masyarakat mempunyai penghasilan lain karena mempunyai keterampilan khusus tersebut. Jika dilihat dari profesi masyarakat yang mayoritas adalah sebagai petani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi ketika mereka mempunyai keahlian khusus mereka bisa mempunyai penghasilan sampingan dari hasil keahlian khusus yang mereka miliki. Kurangnya partisipasi dari masyarakat yang ikut dalam kegiatan gotong-royong akibat dari kurangnya kesadaran dari setiap masyarakat juga dapat mengakibatkan rasa kekeluargaan semakin berkurang. Karena dengan adanya kegiatan gotong-royong rasa kekeluargaan akan mudah ditumbuhkan sehingga masyarakat bisa saling peduli satu sama lain. Ketika rasa gotong-royong ini mulai menghilang maka akan menumbuhkan rasa tidak peduli satu sama lain terhadap pembangunan bersama.

3. Evaluasi

Yang melakukan pemantauan dan evaluasi adalah Tim Ahli dari kabupaten serta aparatur Desa bersama dengan ketua

Pelaksana Program Pembangunan Desa. Namun masyarakat juga ikut terlibat didalam pemantauan dan evaluasi, sehingga masyarakat mengetahui apa saja kendala-kendala yang muncul saat pelaksanaan pembangunan desa. Masukan warga tentang evaluasi dalam terhadap kegiatan dan hasil pembangunan fisik di desa Subun Bestobe bisa dilakukan secara formal maupun informal kepada kepala desa atau pihak-pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pembangunan.

Masukan warga tentang evaluasi dalam terhadap kegiatan dan hasil pembangunan fisik di desa Subun Bestobe tidak semuanya bisa diakomodir karena harus melalui prosedur yang telah ditetapkan bersama. Ada evaluasi yang langsung ditanggapi atau ada juga yang perlu beberapa waktu untu memberi tanggapan.

Dengan adanya evaluasi dari masyarakat maka pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di desa Subun Bestobe menjadi lebih transparan. Tersedianya prosedur evaluasi membuat masyarakat desa bisa merasa senang hati dan menerima karena adanya respon yang cepat dari pihak Pelaksana Pembangunan dan Aparat Desa Subun Bestobe.

PENUTUP

Berdasarkan deskripsi di atas, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tingkat partisipasi masyarakat Desa Subun Bestobe dapat dilihat pada proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan yang tergolong baik. Hal tersebut dapat dilihat dalam keaktifan masyarakat dalam ikut merencanakan, melaksanakan, dan memanfaatkan serta memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan.
2. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa yang kooperatif serta komunikasi yang efektif dalam meregulasi alokasi dan pemanfaatan dana desa di Desa Subun Bestobe sehingga pelaporan pertanggung jawaban dapat dilaporkan dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Partisipasi masyarakat meningkatkan karena kesadaran untuk membangun desa telah tertanam dari dalam diri mereka untuk berkontribusi dalam pengelolaan dana desa.
4. Sikap pemerintah desa yang transparan dan akuntabel dalam memanfaatkan dana desa sehingga meminimalisir terjadinya penyelewengan.
5. Masih terdapat keterbatasan dana yang diperuntukan bagi kemajuan masyarakat desa, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat penulis kemukakan saran yang kiranya dapat berguna bagi semua pihak.

1. Hendaknya pemanfaatan dana desa tidak hanya difokuskan untuk pembangunan fisik semata, karena banyak aspek lainnya yang perlu menjadi diperhatikan. Hal ini mengacu pada sasaran terakhir dari pembangunan desa yakni pemberdayaan masyarakat desa yang berdampak pada peningkatan kapasitas diri dan peningkatan ekonomi desa yang berbasis kemasyarakatan.
2. Dalam pengelolaan dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan dalam semua kalangan baik pemerintah maupun masyarakatnya. Hal ini jelas mengacu pada indikasi keberpihakan hukum dan rakyat yang tidak berkompromi dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme.
3. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dana desa perlu mendapat pengawasan dari pemerintah desa. Masyarakat yang adalah subyek dan obyek dari pembangunan tentu perlu diutamakan sambil terus memperhatikan segala gerak dan pengontrolan yang ketat demi pencapaian hasil yang maksimal dan menghindari penyimpangan-penyimpangan yang merugikan negara dan kepentingan umum.
4. Menambah anggaran dana desa dari yang semestinya, mengingat dana desa sangat bermanfaat untuk kemajuan pembangunan desa. Alokasi dana desa dengan adanya variasi kebutuhan dan jumlah penduduk yang makin bertambah mestinya terus dipikirkan untuk ditingkatkan baik melalui alokasi dana pusat maupun dari bawah dana swadaya masyarakat oleh karena telah berhasilnya peningkatan perekonomian masyarakat desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Juraidih, 2011, *Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan.*
- M. Helmi Watoni Satka, 2012. *Strategi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.*
- Miftahus Surur, 2014. *Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa.*
- Jombang Mondong. 2011. *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.* USU. Medan
- Ndraha Taliziduhu. 2007. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.* Penerbit Yayasan Karya, Celaban Timur.
- Sutami. 2009. *Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Prasarana Universitas Diponegoro.*
- Wicaksono. 2010. *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Studi. Kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan.*
- Muliati. 2019. *Dalam Pembangunan Desa.* Journal Ilmu Administrasi Negara. *Masyarakat Dalam Pembangunan.* Modayag Barat Manado, 9.2:398
- Moleong J. Lexi. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Rosda Karya, Bandung.
2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Rosda Karya, Bandung.